

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN BANTUAN DANA BERGULIR
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
DI DESA TOLUWAYA KECAMATAN BULANGO TIMUR
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Maryam Laleno
STIA Bina Taruna Gorontalo
lalenomar70@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan dan melakukan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan bantuan dana bergulir, melalui kemudahan memperoleh akses terhadap sumberdaya teknologi, akses terhadap fasilitas, akses terhadap informasi pasar, akses terhadap sumber pembiayaan, dinilai belum berhasil memberdayakan masyarakat miskin di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur.

Disarankan perlunya Pemerintah Daerah menyediakan berbagai fasilitas program yang mampu memberdayakan dan memandirikan masyarakat miskin.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Bantuan, Dana, Efektivitas

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, berarti pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh segenap lapisan masyarakat.

Sebagian besar rakyat Indonesia berada di desa, maka

sudah sewajarnya kalau pembangunan itu dititik beratkan pada masyarakat desa. Adapun pembangunan masyarakat desa ini merupakan suatu bentuk tindak kolektif suatu masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dalam artian material dan spiritual.

Masyarakat desa pada kenyataannya sebagian besar masih miskin. Kemiskinan itu disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kondisi alam, sikap/budaya masyarakat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat dan lain-lain.

Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkait dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Sementara kelompok para ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam masyarakat dari sudut pandang yang berbeda. Kelompok ini melihat bahwa kemiskinan muncul dalam suatu masyarakat disebabkan karena adanya suatu ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dalam masyarakat.

Program-program pembangunan yang dijalankan sejak masa Pemerintahan Orde Baru, hingga masa pemerintahan otonomi daerah, sudah cukup banyak diarahkan untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah perdesaan. Program-program tersebut diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berupa pemberian kredit usaha tani dengan bunga yang cukup rendah, program inpres desa tertinggal (IDT), dan akhir-akhir ini dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Secara tidak langsung dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan proyek pembuatan jalan dan jembatan, pembuatan irigasi, padat karya dan lain sebagainya. Program-program tersebut, selain dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pendapatannya, juga dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam menyusun, melaksanakan dan memanfaatkan bantuan.

Dari berbagai program-program yang telah diberikan tersebut, menunjukkan adanya

kesungguhan pemerintah mengentaskan kemiskinan di daerah perdesaan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin dapat mengubah tingkat kehidupannya menjadi lebih baik atas dasar prakarsa dan kemampuannya.

Demikian pula halnya dengan program bantuan dana bergulir melalui PNPM, tidak lain dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat merencanakan dan memanfaatkannya sesuai dengan bidang usaha yang digelutinya. Dengan demikian, bantuan dana bergulir tersebut dapat meningkatkan usahanya sehingga berkembang dengan baik dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sasarannya adalah bagaimana agar masyarakat miskin memiliki kemandirian dalam berusaha dan dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Di samping membiasakan masyarakat berusaha berbuat yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi keluarganya, berarti telah memberdayakan dirinya dalam memperbaiki kehidupan keluarganya.

Di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, penyaluran bantuan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui usaha simpan pinjam kelompok perempuan, dimaksudkan untuk memberikan modal usaha. Bantuan dana bergulir tersebut digunakan untuk berbagai usaha antara lain pembuatan kue, makanan, minyak kelapa tradisional, anyaman tikar dan usaha warung/kios. Berdasarkan pengamatan, bantuan program tersebut ternyata tidak dapat

bergulir untuk membantu kelompok perempuan lainnya yang membutuhkan. Usaha yang mereka jalankan umumnya tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Hal itu dapat diamati dari tingkat kesejahteraannya belum mengalami perubahan. Umumnya bantuan dana bergulir tersebut, tidak digunakan untuk modal usaha. Di kalangan masyarakat miskin di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, jika memperoleh uang terlebih dahulu digunakan untuk menanggulangi hutang piutangnya. Kehidupan mereka selama ini terlilit oleh hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu yang menyebabkan usaha yang dijalankan tidak berkembang dengan baik. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar hanya untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ilmiah guna mengetahui dan memperoleh gambaran yang obyektif tentang efektivitas pemanfaatan bantuan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana efektivitas pemanfaatan bantuan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Toluwaya, Kecamatan

Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas pemanfaatan bantuan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

Secara Teoritis

1. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi berharga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sosial, khususnya di bidang administrasi publik menyangkut pemberdayaan masyarakat.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat dalam mengkaji masalah yang sama.

Secara Praktis

1. Dapat memberikan bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan usaha masyarakat.
2. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman untuk menerapkan ilmu pengetahuan administrasi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, yaitu melalui pengamatan langsung keadaan di lapangan. Kemudian wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, serta bukti-bukti dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pemanfaatan bantuan dana bergulir yang dikonsepsikan sebagai keberhasilan masyarakat dalam memberdayakan diri sehingga memiliki kemampuan usaha melalui kemudahan memperoleh akses terhadap sumberdaya teknologi, akses terhadap fasilitas, akses terhadap informasi pasar, akses terhadap sumber pembiayaan. Deskripsi fokus dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Akses sumber daya teknologi, yaitu suatu kemudahan memperoleh metoda dan tehnik pelaksanaan kegiatan dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien.
2. Akses fasilitas, yaitu kemudahan dalam mendayagunakan fasilitas prasarana dan sarana produksi serta dalam meningkatkan keterampilan berusaha.
3. Akses terhadap informasi pasar, yaitu suatu kemudahan untuk memasarkan hasil usaha.
4. Akses terhadap sumber pembiayaan, yaitu kemudahan untuk memperoleh bantuan kredit untuk modal usaha ekonomi produktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi

dan dokumentasi, analisis deksripsinya diuraikan sebagai berikut:

1. Akses Sumber Daya Teknologi

Akses sumber daya teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu suatu kemudahan memperoleh metoda dan tehnik pelaksanaan kegiatan dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien. Pemberian bantuan modal melalui dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, adalah suatu metode dan tehnik yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan mengakses modal. Namun pemberian bantuan tersebut tidak serta merta membuat masyarakat miskin berdaya.

Warga miskin yang akan diberi bantuan dana bergulir, sebelumnya diberikan pelatihan bagaimana cara mengelola usaha melalui manajemen usaha, perkoperasian, dan pemasaran. Pelatihan tersebut merupakan akses sumber daya teknologi, agar mereka memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan demikian mereka memperoleh kemudahan untuk mengelola usahanya sederhana apapun usaha tersebut, seperti usaha pembuatan kue basah, kering, anyaman tikar dan pengolahan bahan baku kelapa menjadi minyak goreng”.

Berdasarkan pengamatan, mereka yang memperoleh bantuan dana bergulir tersebut umumnya ibu-ibu dari keluarga miskin yang sudah memiliki usaha penjualan kue, anyaman tikar dan pembuatan minyak kelapa. Sebagian besar ibu-ibu yang sudah mendapatkan

bantuan dana bergulir tersebut sudah mengikuti pelatihan, hanya saja apa yang mereka dapatkan dari pelatihan tersebut tidak dipahami dengan baik apalagi dipraktikkan.

Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh kemauan Pemerintah yang secara berkesinambungan dapat memberikan motivasi dan kekuatan terhadap masyarakat miskin. Persyaratan itu merupakan hal mutlak mengingat sumber daya kekuasaan ada pada Pemerintah. Jika tidak ada kesesuaian antara keinginan kelompok sasaran dengan organisasi yang mengelola pemberdayaan masyarakat, maka artikulasi kepentingan kelompok sasaran tidak akan mendapatkan saluran di dalam setiap proses pengambilan keputusan organisasi tentang apa yang mereka inginkan.

Demikian pula yang terjadi dengan masyarakat miskin di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur, tidak adanya kesesuaian antara program, organisasi yang mengelola dalam hal ini Pemerintah Desa dan sasaran dalam hal ini masyarakat miskin, untuk memperoleh akses sumber daya teknologi secara memadai, sehingga usaha yang mereka jalankan mengalami kegagalan.

2. Akses Fasilitas

Akses fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu kemudahan dalam mendayagunakan fasilitas prasarana dan sarana produksi serta dalam meningkatkan keterampilan berusaha. Di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, tidak ada tersedia fasilitas sarana produksi

antara lain peralatan teknologi yang digunakan untuk mengolah pembuatan kue, anyaman tikar maupun pengolahan kelapa menjadi minyak goreng yang lebih berkualitas.

Di Desa Toluwaya ini tidak ada fasilitas produksi yang dimaksud seperti misalnya untuk mengolah kue kering supaya lebih baik dan dapat dipasarkan di luar desa. Umumnya warga disini hanya menggunakan fasilitas yang sederhana dalam mengolah usahanya. Desa yang baru dimekarkan ini sudah tentu belum memiliki fasilitas modern. Di Kecamatan Bulango Timur, belum ada desa yang memiliki fasilitas pengolahan usaha yang berteknologi canggih.

Fasilitas yang ada di Kantor Desa Toluwaya umumnya hanya untuk digunakan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti meja, kursi, dan lemari arsip. Di antara warga desa, selama ini belum ada fasilitas pengolahan usaha termasuk usaha minyak goreng yang selama ini masih diolah secara tradisional.

Berdasarkan pengamatan, bahan baku buah kelapa yang dibuat menjadi minyak goreng di Desa Toluwaya sudah berkurang sebagai akibat dari tidak adanya peremajaan. Umumnya pohon kelapa yang sudah berumur tua ditebang, batangnya dijadikan sebagai bahan bangunan rumah. Sulitnya memperoleh bahan bangunan rumah dari kayu, membuat masyarakat baik di kota maupun di desa mencari alternatif lain dengan menggunakan pohon kelapa. Akibatnya, pohon kelapa mulai berkurang sehingga buahnya semakin mahal. Sementara informan ibu rumah tangga tersebut hanya

keterampilan membuat minyak dari bahan baku buah kelapa. Demikian juga bahan baku anyaman tikar, selain sulit diperoleh, tempatnya jauh harus menggunakan kendaraan yang membutuhkan biaya ekstra.

Fasilitas pengolahan bahan baku yang modern untuk pembuatan kue pada dasarnya dapat meningkatkan keterampilan berusaha. Namun bagi Ibu-ibu di Desa Toluwaya yang memiliki keterampilan membuat kue, selama ini hanya menggunakan fasilitas yang bersifat tradisional. Alasannya, dengan cara pengolahan kue secara tradisional, selain modalnya kecil, mudah digunakan. Demikian pula untuk pembuatan anyaman tikar tidak membutuhkan fasilitas pengolahan yang modern.

Berdasarkan pengamatan, yang menjadi permasalahan ibu-ibu yang memiliki usaha keterampilan kue dan minyak kelapa (goreng), adalah masalah modal dan pemasaran. Terutama bagi ibu-ibu yang menggeluti anyaman tikar, terdesak oleh tikar hasil olahan fasilitas modern. Bagi ibu-ibu yang membuat kue, pemasaran yang baik dalam jumlah banyak, hanya diperoleh apabila ada yang mau pesan untuk pesta atau acara tertentu. Selain itu, pembuatan kue hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan satu hari saja, terutama kue basah tidak tahan lama. Itu .sebabnya mereka tidak membutuhkan fasilitas sarana produksi yang modern untuk mengolah keterampilan usahanya. Selain itu, modal yang diperoleh dari bantuan dana bergulir tidak mampu membiayai pengadaan fasilitas yang modern.

3. Akses Terhadap Informasi Pasar

Akses terhadap informasi pasar yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu suatu kemudahan untuk memasarkan hasil usaha. Sulitnya ibu-ibu memperoleh informasi untuk memasarkan hasil usaha produksinya menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha. Keterampilan usahanya menjadi tidak berkembang karena usaha yang digeluluti tidak mampu menanggulangi kebutuhan hidup keluarga.

Berdasarkan pengamatan, permasalahan sumber pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya masih sulit diperoleh. Pemerintah Daerah belum mengalokasikan anggaran bagi Dinas Koperasi Kabupaten Bone Bolango agar dapat memprogramkan berbagai kegiatan yang memudahkan masyarakat miskin mengakses sumber pembiayaan dalam bentuk koperasi untuk meningkatkan usaha produktif yang mereka kembangkan di desa.

Bantuan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, hanya dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan yang dilaksanakan oleh instansi teknis seperti dari Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemanfaatan bantuan dana bergulir, melalui kemudahan memperoleh akses terhadap sumberdaya teknologi, akses

terhadap fasilitas, akses terhadap informasi pasar, akses terhadap sumber pembiayaan, dinilai belum berhasil memberdayakan masyarakat miskin di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur.

2. Akses sumber daya teknologi, diperoleh masyarakat melalui kegiatan pelatihan tentang manajemen usaha, perkoperasian, dan pemasaran. Namun kegiatannya hanya berlangsung selama satu hari sehingga masyarakat kurang memahami dan menguasai benar materi pelatihan terutama dalam praktiknya.
3. Akses fasilitas untuk memperoleh kemudahan menggunakan sarana dan prasarana produksi dalam meningkatkan keterampilan berusaha, tidak tersedia mengingat usaha masyarakat diolah secara tradisional dan tidak membutuhkan fasilitas prasarana dan sarana produksi yang modern.
4. Akses terhadap informasi pasar untuk memperoleh kemudahan memasarkan hasil usaha, masih mengalami kesulitan. Usaha ibu-ibu lebih banyak dipasarkan di warung dan kios sekitar desa, sedang akses ke luar desa belum memadai, kecuali jika ada pesanan untuk acara hajatan dari keluarga, teman dekat atau tetangga.
5. Akses terhadap sumber pembiayaan untuk memperoleh kemudahan bantuan kredit usaha ekonomi produktif, belum tersedia secara memadai. Belum adanya koperasi yang dapat memberikan kemudahan memperoleh tambahan modal, sehingga

masyarakat lebih cenderung mengharapkan bantuan dana bergulir dari PNPM. Sebagian masyarakat terpaksa harus meminjam di koperasi milik perseorangan dengan bunga tinggi, dan cara pembayaran harian.

SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya Pemerintah Daerah menyediakan berbagai fasilitas program yang mampu memberikan kemudahan memperoleh fasilitas kredit dengan bunga yang sangat rendah dan jaminan pemasaran hasil usaha produktifnya.
2. Perlunya Pemerintah daerah dapat membantu menyediakan sumberdaya teknologi yang dapat meningkatkan kualitas usaha produktif masyarakat miskin.
3. Perlunya Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat miskin dalam hal memperoleh berbagai fasilitas sarana dan prasarana produksi seperti koperasi, kemudahan dalam memasarkan hasil yang memungkinkan dirinya mampu meningkatkan usaha produktifnya.
4. Perlunya kegiatan pelatihan keterampilan secara berkesinambungan yang mampu memberdayakan dan memandirikan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Ibandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intersensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian, Statu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Cet. Ketigabelas, Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyono, Bambang. 2003. *Manajemen Industri Kecil*, Yogyakarta: Liberty
- Chaniago, Amran YS. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan V. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Etzioni, Amiati. 1995. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Gibson, L. James, Ivancevich, M. John, Donnelly, H. James. 1997. *Organisasi, Perilaku Struktur Proses*, Jilid 1, Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta: Erlangga
- Handyaningrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, cet.kesepuluh. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Handoko, Hani.T, 1992, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, H. Melayu S.P. 2007. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Cet. Keenam. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Idrus. M. 1994. *Manajemen dalam Pemerintahan*. Jakarta: Yayasan Penerbit Administrasi
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Bandung: Blantika.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet. Kedelapanbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moekijat. 1999. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Kedua. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Ndraha. Tahzidulu. 2000. *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta W.J.S.1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Press
- Soetrisno. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosopy Press.
- Tim Crescent. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widaningrum, Ambar. 2007. *Makalah "Pembangunan Kesehatan: Agenda Yang Tidak Serius Setelah Otonomi Daerah*, Materi Seminar. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL-UGM
- Widjaja.H.A.W. 2004. *Otonomi Desa*, Cet. Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainun Buchari. H. 1995. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung

Dokumen Lain:

Ketetapan MPR-RI Nomor
IV/MPR/2003, tentang
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional.

Direktur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, 2004,
*Sambutan pada Pembukaan
Temu Karya Pengembangan
Program Pemberdayaan
Masyarakat Bagi Kepala
Badan/Dinas/ Kantor
Pemberdayaan Masyarakat
Propinsi, Kabupaten dan Kota,
di Batu Malang.* Jakarta:
Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia

Modul Pemberdayaan Masyarakat
melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNM), 2010. Jakarta: Ditjen
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia